

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, reformasi terhadap pengelola keuangan dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan untuk menginformasikan posisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau para *stakeholder*.

Reformasi di berbagai negara khususnya indonesia juga berpengaruh pada perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan agar pemerintah dapat beroperasi secara professional dan efisien adalah kesadaran bagi semua pihak, terutama aparat pemerintah untuk selalu memenuhi tuntutan lingkungan dengan berusaha memberikan layanan terbaik secara terbuka dan bertanggung jawab (Juwita *et al.*, 2018). Pemerintah menghadapi banyak tantangan, baik secara internal dalam hal kinerja yang lebih baik maupun secara eksternal, dalam hal tuntutan masyarakat sebagai konsekuensi dari terwujudnya otonomi daerah yang mengutamakan akuntabilitas untuk efisiensi dan peningkatan pelayanan publik.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu

pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut IMF dalam Sudaryo (2017:46) menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pemerintah akan terwujud apabila: terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi pemerintah, ketersediaan sistem informasi bagi publik mengenai pemerintah, sistem anggaran yang terbuka, dan adanya lembaga independen yang mengawasi seluruh proses pemerintah

Salah satu cara untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang umum diterima. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan harus memenuhi ukuran-ukuran normatif agar dapat mencapai tujuannya. Ada empat karakteristik normatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu relevan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan dapat dimengerti.(Adhillah, 2022)

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu penilaian mengenai baik buruknya atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan yang memeriksa, menilai, dan juga memberikan opini tentang kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) masing-masing tahunnya akan mendapatkan penilain berbentuk dari opini

dari badan pemeriksa keuangan (BPK). opini BPK adalah pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan sebagai kesimpulan BPK terkait tingkatan kenormalan informasi yang disediakan pada laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan pasal 6 UU Nomor 15 tahun 2004 mengenai pengecekan cara pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara ada empat bentuk opini diantaranya wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion*) wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), tak wajar (*Adverse opinion*) dan tidak memberi pendapat (*Disclaimer of Opinion*). Ketika opini BPK sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Daerah (LKPD) maka dianggap laporan keuangan yang sudah bebas dari kesalahan saji material. Secara tersirat urutan pada klasifikasi opini diatas dapat menjadi refleksi stratifikasi kualitas kewajaran atas laporan keuangan dari tahun ketahun menunjukkan kinerja pemerintah yang memuaskan.

Pemilihan kabupaten Manggarai Timur sesuai hasil temuan audit Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) pada tahun 2015,2016, 2017 mendapatkan opini BPK wajar dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Masalah terlihat bahwa LKPD Kabupaten Manggarai Timur belum disediakan secara wajar dan berkualitas sebab masih terdapat beberapa akun dan pos yang masih belum disediakan dan berkualitas. Sedangkan dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2021 menunjukkan peningkatan dengan mendapatkan opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski mendapat status opini WTP pada LKPD Kabupaten Manggarai Timur masih ada beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK. Hal itu perlu menjadi perhatian dari pemerintah yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu di

Kabupaten Manggarai Timur terdapat pencatatan penatausahaan persediaan pada dinas sosial, BPBD dan dinas kesehatan yang masih belum tertib, penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib dan terdapat selisih nilai kas antara Neraca dengan laporan arus kas pada LKP BLUD SPAM Kabupaten Manggarai Timur (<https://ntt.bpk.go.id/lkpd-ta-2020-pemerintah-kabupaten-manggarai-dan-kabupaten-manggarai-timur-pertahankan-opini-wtp/>)

Sesuai dengan fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan atau karakteristik yang berlandaskan karakteristik kualitatif, oleh sebab itu diperlukan adanya perbaikan terutama dalam melakukan inventarisasi aset tetap dan mencatat laporan inventarisasi aset, pengawasan internal inspektorat daerah dalam kepatuhan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta penempatan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi akuntansi pada pegawai pemerintah daerah agar dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Selain kepala daerah yang bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, terdapat beberapa peran pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi pemeran utama. Pihak yang paling mengetahui dan berpengalaman dalam mengelola keuangan daerah adalah SKPD yang setiap hari melakukan transaksi. Maka penguatan kinerja SKPD akan meningkatkan kualitas kinerja daerah terutama dalam tata kelola keuangannya. Satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD di beriakan alokasi dana dan barang atau aset yang di butuhkan. Oleh karena itu SKPD di sebut sebagai pengguna anggran dan pegguan aset. SKPD selaku entitas akuntansi pada dasarnya menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan di sampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah.

Penelitian ini akan di lakukan di Kabupaten Manggarai Timur dengan fokus penelitian di bagaian keuangan yaitu bendahara dan Staf akuntansi di 37 SKPD yang berada di Kabupaten Manggarai Timur.

tabel 1. 1
Daftar SKPD Kabupaten Manggarai timur

NO	NAMA-NAMA SKPD
1	Dinas pendidikan dan Olahraga
2	Dinas kesehatan
3	Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
4	Dinas pertahanan
5	Satuan polisi pamong praja
6	Dinas sosial
7	Dinas tenaga kerja dan transimigrasi
8	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
9	Dinas lingkungan hidup
10	Dinas kependudukan dan catatan sipil
11	Dinas pemberdayaan dan masyarakat desa
12	Dinas P2KB3A
13	Dinas perhubungan
14	Dinas komunikasi dan informatika

NO	NAMA-NAMA SKPD
15	Dinas perdagangan, koperasi dan UMKM
16	Dinas PMTSP
17	Dinas perpustakaan dan kearsipan
18	Dinas peternakan
19	Dinas pariwisata dan kebudayaan
20	Dinas pertanian
21	Bagian umum
22	Bagian perekonomian dan administrasi pembangunan
23	Bagian pemerintah dan kesejahteraan rakyat
24	Sekretariat DPRD
25	Badan penanggulangan bencana daerah
26	Inspektorat
27	Badan keuangan daerah
28	Badan kepegawaian dan pengembangan SDM
29	Kecamatan Borong
30	Kecamatan Poco Ranaka
31	Kecamatan Lamba leda
32	Kecamatan Sambi Rampas
33	Kecamatan Elar
34	Kecamatan Kota Komba
35	Kecamatan Rana Mese
36	Kecamatan Poco Ranaka Timur
37	Kecamatan Elar Selatan

Kabupaten Manggarai Timur adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai tepatnya pada tanggal 17 juli 2007. Kabupaten Manggarai Timur sendiri memiliki sembilan kecamatan, 17 kelurahan dan 159 desa. Kabupaten Manggarai Timur lahir dari kesadaran dan cita-cita.

Kesadaran akan fakta pembangunan yang belum maksimal dan cita-cita untuk mengubah keadaan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemerataan pembangunan. Kesadaran dan cita-cita itu menjadi aspirasi. Aspirasi menjadi wacana. Wacana menjadi gerakan bersama perjuangan untuk membentuk Kabupaten Manggarai Timur.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem akuntansi pemerintah. Pada Sistem Akuntansi pemerintah menerangkan bahwa laporan keuangan yang memiliki kualitas wajib melengkapi karakteristik agar relevan, andal, sebanding dan mudah dimengerti. Dalam laporan keuangan, informasi yang diberikan mungkin relevan, namun jika penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka pengguna informasi tersebut mungkin tidak akan mempercayainya. Beberapa faktor seperti ini menyebabkan keandalan laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat dari karakteristik pelaporan keuangan yang memenuhi kualitas yang ditentukan oleh perundang-undangan. Laporan keuangan daerah yang dapat dipercayai akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan daerah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan diaudit untuk memeriksa apakah laporan keuangan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh perundang-undangan (Firman, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamal Pasha 2018, Yaqin & Jatmiko 2018, Binawati 2022 dan Muthafer 2019 sistem

akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indrayani & Widiastuti 2020, dan Febrian Haty Ramadhan, 2018 Sistem Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Keterampilan dan pemahaman yang diperkuat dengan sikap profesionalisme serta implementasinya dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan kerja yang mengikuti standar kerja yang telah ditentukan, merupakan pondasi dari kemampuan tenaga kerja (Wibowo, 2007). Kompetensi yang tepat menjadi faktor yang menentukan kesuksesan organisasi dalam mencapai keunggulan kinerja, terutama jika organisasi memiliki fondasi yang kuat, tercermin pada seluruh proses yang terjadi dalam organisasi dan sesuai dengan bisnis inti (*core business*) (Muhammad, 2018). Kompetensi inti merupakan komponen yang membentuk misi dan budaya organisasi. Dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, keberhasilan organisasi yang efektif sangat bergantung pada keberadaan SDM yang berkompeten (Griffin & Ebert, 2006). Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan kualitas akuntansi pemerintahan, sehingga SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sangat dibutuhkan. SDM yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi keuangan menjadi penyangga utama untuk tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas SDM di bidang akuntansi keuangan menjadi faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh

pemerintah daerah (Adhi & Suardjo, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh aqin & Jatmiko, 2018, Indrayani & Widiastuti, 2020, Binawati, 2022 dan Sundari & Rahayu, 2019 Kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febrian Haty Ramadhan, 2018, Fauzi Isnaen, 2021 Kompetensi Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem pengendalian internal juga menjadi sebagian penyebab yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal mencakup tindakan yang diambil untuk mempertahankan kekayaan organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Ini melibatkan koordinasi organisasi untuk mencapai tujuan pengendalian internal. Tujuannya adalah untuk memperoleh Kepercayaan yang layak mengenai pencapaian tujuan, termasuk hambatan dalam pelaporan keuangan, kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku, efisiensi, dan efektivitas adalah penting. Tujuan dari pengendalian internal adalah untuk mengurangi kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, pengendalian internal tidak hanya berkaitan dengan peninjauan catatan, tetapi juga mencakup evaluasi dari berbagai fungsi operasional dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, memiliki pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk membantu manajemen dalam mengendalikan perusahaan. (Binawati, 2022)

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Yaqin & Jatmiko, 2018, Indrayani & Widiastuti, 2020, Febrian Haty Ramadhan, 2018, Sundari & Rahayu, 2019 Sujana *et al.*, 2020, Hidayah, 2018, dan Muthaher, 2019 Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Fauzi Isnaen, 2021 Sistem pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan penjelasan penjelasan di atas terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Dengan demikian Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah, kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan antara lain:

- a. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berpengaruh bagi Kualitas Laporan keuangan?
- b. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan?
- c. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dari masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah pada

Kualitas Laporan keuangan

- b. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan
- c. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada Kualitas Laporan Keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat, yakni menambah wawasan baru dan dapat membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan unsur-unsur variabel yang dipakai dalam penelitian ini. Dan untuk penelitian selanjutnya semoga bisa menjadi referensi dan informasi dalam melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini ada 5 (lima) bab, yakni:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kebermanfaatan penelitian, dan susunan penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian, termasuk teori pendukung, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III Metodologi Penelitian

Berisi tentang penjelasan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian

mencakupi objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan populasi dan sampel, variabel penelitian dan teknik analisa data.

BAB IV Gambaran Umum Subyek Penelitian

Berisi tentang penjelasan obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V Penutup

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran